

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tampilnya Orde Baru di dunia politik Indonesia menggantikan kekuasaan Orde Lama, diawali dengan dukungan serta respon yang baik dari kelompok-kelompok organisasi Islam, seperti KAMI dan KAPPI yang memiliki anggota mayoritas Islam. bahkan kelompok Islam ini menjadi ujung tombak Orde Baru untuk menentang rezim Orde Lama yang kala itu juga didukung oleh kelompok militer. Mereka menentang Orde Lama dibawah pemerintahan Soekarno yang dianggap otoriter serta sudah tidak mampu lagi memenuhi tanggung jawab secara konstitusional.

Orde Baru dimulai dengan penuh harapan oleh banyak kalangan Islam yang sudah tidak ingin lagi mempercayai Soekarno. Diikuti dengan harapan dari kalangan Islam untuk dapat kembali berperan di pemerintahan, namun harapan itu segera sirna ketika Soeharto tidak hanya menyingkirkan kepentingan PKI dari pemerintahan, namun juga menyingkirkan kelompok Islam di pemerintahan karena dianggap pernah melanggar UUD 1945 dan melakukan penyimpangan terhadap Pancasila.¹ Bahkan umat Islam pada masa Orde Baru makin terpinggirkan dibanding masa Soekarno di Orde Lama, penilaian ini berdasarkan pada kebijakan politik Orde Baru yang bisa dikatakan lebih anti politik Islam.

¹ Muhammad Hisyam, *Krisis Masa Kini Dan Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 355.

Soeharto bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang cukup tangguh dan memiliki strategi yang mantap. Pada masa kepemimpinannya Soeharto dengan gemilang berhasil menciptakan kondisi politik yang stabil. Sesuai dengan latar belakang budaya Jawa yang dianutnya, dengan filosofi dari tujuan akhir dari kepemimpinan Soeharto adalah *negara tata tenterem kerta raharja, gemah ripah loh jinawi* yang memiliki makna segala kemakmuran dan kesejahteraan adalah semata-mata untuk bangsa Indonesia.²

Soeharto tampaknya banyak belajar dari pengalaman Orde Lama yang menitik beratkan pada politik sebagai kegiatan kenegaraan, Orde Baru di bawah Soeharto lebih menitik beratkan terhadap bidang ekonomi pembangunan yang pragmatis, nonsektarian dan menumbuhkan komitmen terhadap ideologi resmi negara 'Pancasila'.³

Strategi pemerintahan Orde Lama yang berorientasi terhadap ideologi dan politik, dinilai oleh Soeharto sebagai salah satu penyebab ketidakstabilan politik dan kehancuran ekonomi yang tentunya menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto merasa perlu menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai kebijakan penting yang mampu mendorong pembangunan ekonomi dengan sukses. Dengan begitu pemerintahan Soeharto menitik beratkan kebijakan di bidang ekonomi, dan politik sebagai upaya mewujudkan politik yang menunjang pembangunan ekonomi Indonesia.

² G. Dwipayana and Ramadhan K.H., *Soeharto: Pikiran, Ucapan Dan Tindakan Saya* (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989), 581.

³ Taufiq Nugroho, *Pasang Surut Hubungan Islam Dan Negara Pancasila* (Yogyakarta: Padma, 2003), 39.

Diawal kekuasaannya, salah satu kebijakan yang dipilih pemerintahan Orde Baru adalah modernisasi sebagai titik awal dan kerangka landasan pembangunan bangsa.⁴ Dipilihnya modernisasi sebagai jalan alternatif dalam membangun bangsa Indonesia setelah pemerintahan rezim sebelumnya tidak berhasil memenuhi tuntutan dan harapan rakyat.

Secara pribadi Soeharto yang kala itu menjadi pemimpin Orde Baru mampu memimpin serta dapat membangun perekonomian bangsa menjadi kuat dan stabil. Perencanaan pembangunan kala itu dilakukan secara bertahap, pemerintah kala itu menempatkan faktor stabilitas nasional politik, disiplin nasional, serta keamanan nasional sebagai faktor-faktor yang sangat penting dalam pembangunan nasional yang dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan ideologi pancasila.

Rezim Orde Baru ini juga berusaha untuk menghilangkan perbedaan ideologi dari berbagai kelompok yang ada di masyarakat, sebagai upaya untuk melaksanakan pembangunan masyarakat pada umumnya dilakukan dengan tindakan politik rakyat diarahkan pada prinsip loyalitas terhadap ideologi Tunggal Pancasila, yang diharapkan dapat memantapkan stabilitas nasional dan menyongsong tahap tinggal landas dimana masyarakat Indonesia sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila.⁵

Di bawah kepemimpinan Soeharto 1966 sampai dengan tahun 1998, status Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan pada filsafat Pancasila

⁴ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Politik "Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), 17.

⁵ Dwipayana and K.H., *Soeharto: Pikiran, Ucapan Dan Tindakan Saya*, 410.

diidentifikasi sebagai sebuah usaha untuk membangun Indonesia menjadi sebuah negara sekuler.⁶ Di bawah sebuah rezim yang cenderung sekuler⁷ banyak dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang dianggap membatasi ruang gerak mayoritas agama, khususnya umat Islam. Pemerintahan Soeharto mengeluarkan undang-undang yang melarang penggunaan jilbab di sekolah negeri, diruang publik, mengeluarkannya kebijakan asas tunggal.

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang berusaha memisahkan Islam dan politik tidak hanya terjadi di Indonesia saja, beberapa tokoh pemimpin negara-negara Islam lainnya pernah berpandangan bahwa urusan politik harus diatur dalam bentuk sekuler. Seperti pada kasus di Iran pada masa kepemimpinan Reza Pahlevi yang berhasil dilengserkan ada tahun 1979, di masa pemerintahannya ia meminta pasukannya untuk turun ke jalan dan membuka jilbab, bahkan Ia melarang perempuan yang bekerja di sektor pemerintahan untuk menggunakan jilbab. Di Turki Mustafa Kamal Atatürk memberikan kebijakan yang lebih jauh lagi, ia dengan tegas menolak peran agama dalam politik Praktis dan mendirikan Republik Turki Modern yang sekuler di atas reruntuhan kekhilafahan Usmani. Hal-hal yang berhubungan dengan agama tidak diperkenankan untuk masuk kedalam tataran politik praktis.⁸

⁶ Barbara Crossette, "Suharto and Islam Clash on Principle," *New York Times*, 1985, <https://www.nytimes.com/1985/02/03/weekinreview/suharto-and-islam-clash-on-principle.html>.

⁷ Michael R.J. Vatikotis, *Indonesian Politics under Suharto: The Rise and Fall of the New Order* (London: Routledge, 1998), 121.

⁸ Nader Hashemi, *Islam Sekularisme Dan Demokrasi Liberal* (Jakarta: Gramedia, 2010), 68.

Kemudian penulis tertarik untuk membandingkan kebijakan kebijakan Soeharto pada masa Orde Baru dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Turki pada masa kepemimpinan Mustafa Kamal Ataturk.

Sebagai sebuah Negara besar yang berada di kawasan Eurasia, wilayah Turki modern telah menyaksikan kelahiran banyak peradaban-peradaban besar, termasuk didalamnya Kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Turki Utsmani. Selain itu letak Geografisnya yang strategis yang merupakan persilangan diantara dua benua, menjadikan budaya Turki menjadi campuran budaya yang unik antara Timur dan Barat.

Kontak awal Turki dengan dunia Barat dimulai ketika jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, ibu kota Bizantium ke tangan pasukan Turki Usmani yang kala itu pimpinan Sultan Muhammad II.⁹ Konstantinopel kemudian diganti namanya menjadi Isbanbul, menjadi salah satu kota metropolis yang berada di antara benua Asia dan Eropa. Inilah awal mula dari masa keemasan Turki Usmani, yang terus bersinar hingga abad ke-18. Ikut sertanya Turki dalam Perang Dunia I di tahun 1918, yang kemudian diikuti dengan kekalahan di pihak Sentral yang didukung Turki saat itu, menjadi titik balik kemunduran bagi Imperium Turki Usmani. Banyak dari wilayah kekuasaan Turki Usmani yang jauh dari pusat Imperium membebaskan diri, belum lagi usaha negara negara sekutu yang berupaya menjadikan Turki sebagai negara koloni. Kondisi Turki yang porak poranda saat itu menumbuhkan semangat nasionalisme pada generasi-

⁹ Syafiq A. Munghni, *Sejarah Kebudayaan Islam Di Turki* (Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu, 1997), 122.

generasi muda di Turki.¹⁰ Yang kemudian terjadilah revolusi Turki di bawah pimpinan Mustafa Kamal pada tahun 1919-1923.

Mustafa Kamal Sebagai seorang tokoh pembaharu Turki yang berhasil mendirikan Negara Republik Turki setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Ustmani dengan prinsip sekularisme, modernisme dan nasionalisme. Mustafa Kamal menjadikan Turki menjadi sebuah rezim dengan satu partai yang diktator, dengan kebijakan kebijakannya yang membungkam semua oposisi yang ada, dan kebijakan kebijakannya yang sekuler yang mana memaksa mengganti Kopyah (fez) dengan topi koboï serta batasan batasan memakai pakaian keagamaan khususnya Islam di lingkungan umum,¹¹ menghapus kementerian syariah dan Yayasan (*Şerriye ve Evkaf Vekaleti*) dan kebijakan kebijakannya lainnya, hal ini yang menurut Mustafa Kamal Sangat penting untuk memuliakan dan agama Islam yang telah digunakan sebagai alat politik selama berabad-abad.¹²

Dalam sejarah modern Indonesia dan Turki memperlihatkan berbagai strategi kebijakan terhadap institusi Islam Politik telah dikeluarkan oleh kedua rezim yang berkuasa di masing masing negara. Masa pemerintahan Soeharto yang dikenal dengan Orde Baru di Indonesia pada tahun 1968-1998 dan masa Pemerintahan Mustafa Kamal Atatürk sebagai bapak Turki pada 1923-1938 termasuk masa yang krusial dalam hal hubungan rezim penguasa dengan Islam Politik. Kedua pemimpin ini selama berkuasa sama-sama memperlakukan Islam

¹⁰ Munghni, 91.

¹¹ Erik J. Zürcher, *Sejarah Modern Turki* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 243.

¹² Gazi Mustafa Kemal, *Nutuk*, ed. Nejat Bayramoğlu and Kurtuluş Güran (Ankara: Kaynak Yayınları, 2015), 634–635.

dengan berbagai strategi dan kebijakan dengan legitimasi yang diperlukan untuk stabilitas politik ataupun demi kepentingan rakyat.

Ada beberapa alasan mengapa penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan pengkajian ini, baik di Turki dan Indonesia keduanya memiliki jumlah penduduk yang terbanyak dalam mayoritas pemeluk agama Islam yang beraneka ragam faham, terlebih lagi Indonesia yang sering disebut sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Keduanya, baik Turki maupun Indonesia juga memiliki perjalanan sejarah panjang dengan Agama Islam, sebut saja Turki sebagai wilayah yang menjadi saksi berdirinya sebuah kekhalifahan Usmani yang juga mewarisi peradaban Islam peninggalan Kekhalifahan Usmani. Di bawah Kepemimpinan rezim Soeharto dan Mustafa Kamal posisi Islam baik sebagai Agama maupun Politik mengalami dinamika. Berangkat dari kenyataan tersebut yang memunculkan ketertarikan bagi penulis untuk lebih lanjut menelaah bagaimana sesungguhnya posisi Islam Politik di kedua negara tersebut, saat berada di bawah kepemimpinan Mustafa Kamal Ataturk di Turki 1923-1938 dan Soeharto di Indonesia 1968-1998, dengan judul penelitian **“Perbandingan Kebijakan Soeharto 1968-1998 dan Mustafa Kamal 1923-1938 Terhadap Islam Politik”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan mengenai posisi Islam politik di Indonesia pada masa Soeharto dan Islam Politik di Turki pada masa Mustafa Kamal Ataturk. maka ditentukan rumusan masalah, yaitu”

1. Bagaimana Biografi Soeharto dan Mustafa Kamal Ataturk?
2. Bagaimana posisi Islam Politik di Indonesia dan Turki di bawah kepemimpinan Soeharto dan Mustafa Kamal?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan kebijakan serta sikap kedua tokoh terhadap Islam Politik di kedua negara?

C. Tujuan Penelitian

Setelah membaca dan memahami latar belakang dan rumusan masalah diatas mengenai *“Perbandingan Kebijakan Soeharto 1968-1998 dan Mustafa Kamal 1923-1938 Terhadap Islam Politik”* dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui biografi kedua tokoh, baik Mustafa Kamal maupun Soeharto
2. Berusaha melihat bagaimana sikap serta perlakuan Soeharto dan Mustafa Kamal dalam melihat posisi Islam politik di masa kepemimpinannya, serta dampaknya terhadap Islam.
3. Berusaha melihat letak perbedaan dari pola kedua tokoh, Soeharto dan Mustafa Kamal yang berhubungan dengan sikap, pandangan dan perlakuannya terhadap umat Islam di masa pemerintahan keduanya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian yang bersifat analisis yang menunjukkan kedudukan penelitian yang sedang direncanakan di diantara hasil hasil penelitian

terdahulu yang relevan.¹³ Sehingga penelitian yang akan dilakukan saat ini mendapatkan data-data maupun informasi yang lengkap serta menghindari plagiasi dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dicapai pada saat ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdu Mannan dengan judul "*Islam Politik: Studi Komparatif Antara Mustafa Kamal Ataturk dan Soekarno*". Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Islam Politik di bawah kepemimpinan kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan dan persamaan. Kebijakan Islam politik di Indonesia pada masa Soekarno memang tidak seradikal kebijakan Islam politik Mustafa Kamal di Turki.
2. Penelitian disertasi yang ditulis Oleh Mahmud Hamzawi Fahim Usman dengan judul "*Kebijakan Rezim Otoriter Terhadap Islam Politik (Studi Kasus Rezim Soeharto Dan Anwar Sadat)*". Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian pustaka dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan teori kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua tokoh diatas memiliki persamaan dalam pola dan tujuan, walaupun dalam urutan dan taktik penerapan berbeda. Kebijakan Soeharto dan Anwar Sadat secara umum dapat dikatakan pragmatis realistik sebagai salah satu usaha untuk memaksimalkan kekuatan pemerintahan dan demi kepentingan rezim yang berkuasa sehingga dapat mengalahkan

¹³ UIn Sunan Gunung Djati, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019), 15.

kekuatan oposisi yang dalam hal ini institusi Islam Politik dengan tujuan mewujudkan stabilitas politik serta menghindari krisis legitimasi.

3. Buku Karya Abdullah Shodiq yang berjudul “*Mustafa Kemal, Soekarno, dan Abdurrahman Wahid: Bapak Pendiri Turki dan Indonesia Baru (Persamaan dan Perbedaan Politik Kenegaraan)*”

Buku ini menguraikan dengan seksama latar belakang ketiga tokoh, mulai dari biografi, pemikiran hingga penerapannya dalam pemerintahan. Dalam buku ini juga dibahas bagaimana ketiga tokoh tersebut dengan ideologi politik serta kenegaraannya yang khas serta persamaan dan perbedaan di berbagai aspek.

Posisi penelitian penulis tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana dalam penelitian ini penulis membandingkan kebijakan Soeharto dan Mustafa Kemal terhadap Islam politik, yang kebetulan belum pernah ditelaah sebelumnya.

E. Langkah Langkah Penelitian

Dalam penulisan kali ini penulis mengkhususkan menulis tentang perbandingan antara kebijakan Soeharto dan Mustafa Kemal Ataturk dengan menggunakan metode penelitian historis, adapun yang dimaksud dengan metode penelitian historis ialah suatu proses menguji serta menganalisis secara kritis terhadap rekaman atau peninggalan masa lampau yang kemudian menuliskan

hasil temuan tersebut berdasarkan pada fakta yang telah didapatkan.¹⁴ Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dari metode penelitian sejarah yang meliputi, tahapan Heuristik (Pengumpulan data), verifikasi (Kritik Sumber), interpretasi (Analisis data) dan diakhiri dengan Historiografi (Penulisan sejarah).

1. Heuristik

Heuristik menurut Helius Syamsudin merupakan sebuah usaha untuk mencari dan mendapatkan data-data yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti,¹⁵ yang juga merupakan tahapan awal dari dalam melakukan penelitian sejarah. Dalam tahapan ini peneliti dituntut untuk mengatur strategi dalam menemukan sumber dan informasi tentang tema yang akan dikaji. Adapun menurut pendapat Ismaun heuristik adalah pengetahuan tentang sumber-sumber yang baik secara langsung maupun tidak dapat memberikan pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masyarakat pada masa lampau.¹⁶

Seiring dengan berkembangnya teknologi, pada saat ini sumber sejarah tidak hanya dapat diperoleh atau diakses dari perpustakaan-perpustakaan museum-museum, ataupun badan arsip yang terdapat di suatu negara. Internet telah memberikan kemudahan dalam mengakses sumber-sumber sejarah yang diinginkan, baik berupa buku referensi cetak maupun buku referensi yang telah didigitalisasi atau biasa disebut *e-book*, maupun sumber sumber seperti surat kabar yang disediakan secara digital oleh surat kabar terkait.

¹⁴ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1986), 2.

¹⁵ Helius Samsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), 55.

¹⁶ Ismaun, *Sejarah Sebagai Ilmu* (Bandung: Historia Utama Press, 2005), 41–42.

Sehingga pada tahapan ini penulis melakukan pelacakan sumber baik dengan daring maupun dengan mengunjungi tempat tempat yang sekiranya memiliki relevansi dengan kebijakan politik Soeharto dan Mustafa Kamal. Adapun tempat tempat yang telah dikunjungi adalah Perpustakaan Batu Api, Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati.

Dalam pencarian sumber tersebut penulis menemukan beberapa informasi yang sekiranya dapat dijadikan Sumber

a. Primer

1) Buku

- a) Kemal, Gazi Mustafa.2015. *NUTUK*. Diedit oleh Nejat Bayramoğlu dan Kurtuluş Güran. Ankara: Kaynak Yayinlari.
- b) G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. 1989. *Soeharto: Pikiran, Ucapan Dan Tindakan Saya*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.

2) Dokumen

- a) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLIV/MPRS/1968 Tahun 1968.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

3) Media Cetak

- a) Surat Kabar Yozgat terbitan 2 November 1922, No: 62 tahun I
- b) Surat Kabar Paşaili terbitan 25 Juli 1923, No: 42 tahun I
- c) Surat Kabar Kengiri terbitan 3 Maret 1925, No: 131 tahun III
- d) Surat Kabar Cankiri terbitan 1 Desember 1925, No: 168 tahun IV
- e) Surat Kabar GuzelOrdu terbitan 5 November 1928
- f) Majalah Kiblat Terbitan 5 Oktober 1984 No.10 Tahun XXXII
- g) Majalah Panji Masyarakat terbitan 1 Januari 1984 No 418
- h) Surat Kabar Kompas edisi Senin, 8 Januari 1973
- i) Surat Kabar Kompas edisi Jumat, 14 September 1984
- j) Surat Kabar Kompas edisi Selasa, 11 Desember 1990

b. Sekunder

1) Buku

- a) Erik J. Zurcher. 2003. *Sejarah Modern Turki*. Terj. Karsidi Diningrat
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- b) Michael R.J.Vatikiotis.1998. *Indonesian Politics under Suharto: The Rise and Fall of the New Order*. London: Routledge.
- c) M. Rusli Karim. 1999. *Negara dan Pemingguran Islam Politik..*
Yogyakarta:PT Tiara Wacana Yogya.
- d) Binnaz Toprak. 1999. *Islam dan Perkembangan Politik di Turki* . Terj.
Karsidi Diningrat. Yogyakarta :PT. Tiara Wacana Yogya.

- e) Dhabith Tarki Sabiq. 2008. *Kamal Attaturk: Pengusung Sekulerisme dan Penghancur Khilafah Islamiah*. Terj. Abdullah Abdurahman dan Ja'far Shadiq. Jakarta: Senayan Publishing.
- f) Mukti Ali. 1994. *Islam dan Sekularisme di Turki*. Jakarta: Djambatan.

2. Kritik

Dari hasil pencaharian sumber yang telah penulis lakukan, maka kemudian penulis melakukan verifikasi atau kritik yang bertujuan untuk menguji autentisitas dan kredibilitas sumber.

- 1) Buku yang berjudul *Nutuk* merupakan sebuah buku yang berisikan pidato Ataturk yang disiapkan untuk publikasi, di dalam buku ini banyak pidato serta tulisan Mustafa Kamal yang ditulis dan direvisi oleh Mustafa Kamal. Edisi pertama buku ini pertama terbit pada tahun 1927 yang ditulis dalam bahasa Arab, yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa latin pada edisi 1934 dan 1938. Perbedaan antara setiap edisi ditulis dalam catatan kaki. Buku ini tentu merupakan sumber primer karena berisikan pidato serta tulisan Musatafa Kamal, sehingga informasi yang dimuatnya kredibel meskipun sumber tersebut merupakan sumber turunan.
- 2) Buku otobiografi Soeharto: *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, merupakan sebuah buku yang ditulis oleh G. Dwipayana dan Ramadhan K.H yang berdasarkan pertanyaan yang disampaikan Soeharto kepada mereka, yang diterbitkan pada tahun 1989, yang menjadikan buku ini autentik . Berdasarkan pengamatan saya buku ini merupakan sumber primer karena merupakan pernyataan yang dipaparkan Soeharto, terlebih lagi

buku ini juga direvisi oleh Soeharto, menjadikan buku ini memiliki informasi kredibel, Sehingga buku ini dikategorikan sebagai sumber primer.

- 3) Buku yang ditulis oleh Erik J. Zürcher *Sejarah Modern Turki*. Yang memuat sejarah turki modern dari mulai awal modernisasi pada akhir abad 18 sampai dengan Turki di tahun 1980-an. Meskipun didalamnya terdapat informasi primer dan kredibel, namun buku ini merupakan tulisan seorang sinologi asal Belanda yang juga profesor Asia Timur di Universitas Laiden. Sehingga buku ini merupakan rujukan Sekunder.
- 4) Buku yang ditulis oleh M. Rusli Karim yang berjudul *Negara dan Peminggiran Islam Politik* yang didalamnya berisi tentang pengaruh kebijakan pembangunan masa Orde Baru terhadap Islam politik, yang mana pada masa itu islam mengalami peminggiran, buku ini diterbitkan pada tahun 1999, buku ini memiliki informasi primer terlebih lagi penulis hidup dan tumbuh di jaman Orde Baru.

Dari sumber-sumber diatas meskipun beberapa buku tersebut merupakan buku cetakan lama yang sudah usang, namun jumlah halaman masih utuh, serta tulisan masih dapat dibaca dengan jelas. Dengan begitu sumber-sumber diatas merupakan sumber yang otentik dan layak dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

3. Interpretasi

Interpretasi sejarah atau disebut juga analisis sejarah merupakan tahapan penelitian sejarah yang menurut Kuntowijoyo di dalamnya ada dua metode yang

digunakan yaitu analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan).¹⁷ Analisis sejarah pada dasarnya bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang telah diperoleh dari sumber sejarah yang telah diolah. Kemudian bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi secara menyeluruh.

Penulis melakukan analisa sejarah dengan menggunakan pendekatan komparatif, atau biasa disebut dengan sejarah perbandingan yang mana membandingkan pembangunan¹⁸ di satu tempat dengan tempat lainnya, yaitu dengan membandingkan antara kebijakan Soeharto dan Mustafa Kamal terhadap Islam Politik. Meskipun perbandingan merupakan sesuatu yang sulit dilakukan, namun dengan pendekatan komparatif ini diharapkan dapat melihat apa yang ada dan tidak ada,¹⁹ dengan kata lain melihat perbedaan dan persamaan kebijakan dari Soeharto dan Mustafa Kamal.

Pada interpretasi ini, penulis menggunakan interpretasi yang digagas oleh Thomas Carlyle yang dikenal dengan teori *The great Man* atau Manusia Besar, teori ini menyatakan bahwa seluruh gerak sejarah dimainkan oleh Manusia Besar, pemimpin dan tokoh.²⁰ Seorang manusia besar dianggap sebagai intelektual universal yang dapat merubah masyarakat. Meski begitu perubahan yang dilakukan oleh *The Great Man* ini tidak hanya semata-mata karena faktor

¹⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 91.

¹⁸ Seperti yang dijelaskan oleh Kuntowijoyo salah satu tolok ukur pembangunan adalah Pancasila dan UUD 1945, serta kerangka acuannya GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Kuntowijoyo, 148–50.

¹⁹ Peter Burke, *Sejarah Dan Teori Sosial*, 2nd ed. (Jakarta: Obor Indonesia, 2015), 32.

²⁰ Ajid Thohir and Ahmad Sahidin, *Filsafat Sejarah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 83.

Intelektualnya, namun juga karena kemampuannya dalam mengambil tindakan di tengah masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan di atas baik Soeharto maupun Mustafa Kamal merupakan seorang tokoh yang menjadi penggerak sejarah, misalnya Mustafa Kamal dengan gerakan revolusinya merubah Kesultanan Turki Usmani menjadi Negara Republik Turki yang sekuler, dan Soeharto yang merubah sistem Presidensial Orde Lama menjadi sistem Presidensial Orde Baru, Selain itu baik gagasan atau kebijakan kedua tokoh masih memiliki pengaruh di Indonesia dan Turki bahkan sampai saat ini

4. Historiografi

Bab pertama meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, serta langkah langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab kedua membahas mengenai biografi singkat Soeharto dan Mustafa Kamal, termasuk cerita karir kedua tokoh baik dalam militer maupun politik hingga menjadi tokoh negara. Dengan sub pembahasan, Biografi Mustafa Kamal dan Biografi Soeharto.

Pada bab ketiga, penulis akan membahas mengenai posisi dan keadaan Islam Politik di Indonesia dan Turki di bawah kepemimpinan Soeharto dan Mustafa Kamal. Dengan sub pembahasan, *pertama*. Posisi Islam politik Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto. *Kedua*, Posisi Islam politik Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kamal. Dan yang *ketiga*, adalah perbedaan dan persamaan kebijakan Soeharto dan Mustafa Kamal.

Bab keempat penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

